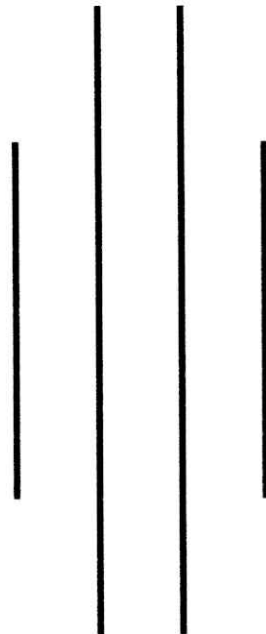




BADENDA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PAJAK KITA. UNTUK KITA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025



Disusun oleh:

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Disusun pada tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dimulai dengan tahapan penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Penetapan Renja, sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk maksud itulah, dokumen ini disusun.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Untuk itulah, Renja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20252045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang berisi program-program yang

dilaksanakan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
- b. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat;
- c. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab II merupakan Bab yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III** : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- BAB IV** : Bab IV merupakan Bab yang berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V** : Bab V merupakan Bab yang berisikan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 3 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 46 sub kegiatan Alokasi dana tahun 2025 untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 6.515.271.982- dan terealisasi sebesar Rp. 4.560.232.309 atau 69.9 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan berupa pengelolaan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga memiliki tugas dan fungsi Pelayanan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, efisien dan transparan kepada masyarakat khususnya memberikan kemudahan layanan dalam pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.

Oleh Karena itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan memberikan kemudahan layanan kepada Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai langkah yaitu menyediakan layanan pembayaran pajak daerah secara online melalui Aplikasi Pajak Mandiri Sistem Aplikasi Non Tunai (PM SANTUN) Aplikasi ini untuk memastikan pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan transparan karena penerimaan lebih tertib dan terdokumentasi serta meminimalisir resiko kesalahan dan penyelewengan, selain itu, juga telah dilaksanakan pendampingan pengisian PBB secara online melalui Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Masyarakat (SIAP PM) kepada Aparatur Pekon yang merupakan petugas penagih PBB, langkah ini juga sebagai upaya mengatasi kendala akibat topografi daerah yang cukup sulit serta cakupan wilayah yang luas.

Badan Pendapatan Daerah juga telah memberikan kemudahan layanan dengan memberikan alat laju perekam transaksi keuangan (*tapping box*) kepada pelaku usaha untuk memudahkan penghitungan pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, sebagai upaya untuk memudahkan pembayaran pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah telah memberikan Pelayanan berupa penagihan pajak daerah untuk restoran dan hotel

secara langsung yang dilaksanakan adalah berupa pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan itu, dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target	Realisasi	Rasio Capaian
1	Persentase peningkatan PAD.	6%	6%	100%

Sementara itu, untuk Tahun 2025 perkiraan target pencapaian kinerja BAPENDA Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran strategis **"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"** Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 10 (sepuluh) persen hal ini didukung dengan adanya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor ditengah pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BAPENDA dihadapkan pada isu-isu penting yang strategis terhadap keberadaan BAPENDA. Isu-isu penting yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang dinamis.

Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 15 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akan tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian.

Selain itu, regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat saat ini juga tengah menghadapi efisiensi anggaran, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah menjadi sebuah keharusan agar pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tidak terhambat.

Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam memaksimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah harus merumuskan kebijakan dan strategi yang konkrit dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat, Pada saat ini, target peningkatan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah 10 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini masih belum optimal.

Penyebab :

- Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih perlu ditingkatkan.
- Belum tersedianya *database* potensi yang akurat.
- Kondisi geografis wilayah Kabupaten Lampung Barat yang cukup menyulitkan dalam proses pendataan dan penagihan Pendapatan Asli Daerah
- Kurangnya potensi PAD yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
- Sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang masih perlu dibenahi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Perubahan Rencana Kerja BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut :

TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Daerah BAPENDA	83,75 %	2.236.196.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Daerah BAPENDA	83,75 %	2.236.196.300	
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	40.068.300	Kegiatan : Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	40.068.300	
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	5.899.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	5.899.500	
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.198.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.198.000	
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.738.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.738.000	

TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.244.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.244.400	
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.261.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.261.400	
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.977.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.977.000	
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	5.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	5.750.000	

TABEL 2.2.
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 42 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	1.512.748.250	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan an/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 42 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	5.689.960.000	
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	1.503.605.250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	1.503.605.250	

TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.450.000	12
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.815.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2.815.000	
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Balik Bukit	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.878.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.878.000	
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	4.402.000	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	4.402.000	
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	4.402.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	4.402.000	
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi		Jumlah Dokumen Administrasi	17 Laporan	55.075.000	Kegiatan : Administrasi		Jumlah Dokumen Administrasi	17 Laporan	55.075.000	

TABEL 2.2.
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	55.075.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	55.075.000	
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 2 Dokumen - 6 Orang	22.890.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 6 Orang	69.265.000	
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	7.890.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	7.890.000	

TABEL 2.2.
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	
1												
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	4 - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 - 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	6 136.059.950	7 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	9 - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 - 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	11 136.059.950	12	
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Balik Bukit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.038.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Balik Bukit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.038.350 Paket	5.983.000		
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.530.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20.530.600 Paket	109.950.000		
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Perundang-	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.860.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	7.860.000 Dokumen	3.960.000		

TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	undangan							Undangan yang Disediakan			
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.992.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.992.200 Laporan	4.180.000	
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	89.638.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.638.800 Laporan	258.408.000	
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	42 Unit	131.200.000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	131.200.000 Unit	365.000.000	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit mebel yang disediakan	10 Unit	46.800.000	Pengadaan Mebel	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit mebel yang disediakan	46.800.000 Unit	46.800.000	
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	84.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84.400.000 Unit	365.000.000	
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	114.886.300	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	114.886.300	

TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Balik Bukit	Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.940.000	
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	41.025.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.025.000 Laporan	103.390.000	
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	68.111.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.111.300 Laporan	20.700.000,00	
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	32 Unit	210.608.500	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	210.608.500 Unit	676.168.000	
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	131.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	131.800.000	
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	11.910.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	11.910.000	
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	66.898.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	66.898.500	

TABEL 2.2.
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase Piutang Daerah	- 100% - 100%	109.343.950	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase Piutang Daerah	- 100% - 100%	109.343.950	
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 24Dokumen	63.582.000	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		- Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 24Dokumen	2.295.851.000	
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Perencanaan Anggaran pendapatan	4 Dokumen	63.582.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	63.582.000	
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	- 1 Dokumen	45.761.950	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	- 1 Dokumen	45.761.950	
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul/Akibar Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul/Akibar Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	45.761.950	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	45.761.950	
5:02:04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			100 %	2.750.793.500	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Realisasi PAD - Persentase Ralisasi PBB	100 %	2.750.793.500	
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan		- Persentase Realisasi PAD	100 %	2.750.793.500	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan		- Persentase Realisasi PAD	100 %	2.750.793.500	

TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.01.02.	pendapatan Daerah	Seluruh Kecamatan	- Persentase Ralisasi PBB Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	339.959.000	pendapatan Daerah	Seluruh Kecamatan	- Persentase Ralisasi PBB Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	339.959.000	
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	270.275.800	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	270.275.800	
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	47.028.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	47.028.000	
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kec. Batu Brak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	263.855.600	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kec. Batu Brak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	263.855.600	
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	636.724.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	636.724.000	
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kec. Balik Bukit	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak	399.999.600	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kec. Balik Bukit	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak	399.999.600	
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	129.021.600	Penetapan Wajib Pajak	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	129.021.600	

TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPENDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pajak Daerah	Bukit	Ketetapan Pajak Daerah			Daerah	Bukit	Ketetapan Pajak Daerah			
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	205.545.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	205.545.000	
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	358.530.800	Penagihan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	358.530.800	
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	29.318.100	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	29.318.100	
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	70.536.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	70.536.000	
		JUMLAH			5.096.333.750		JUMLAH			5.096.333.750	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah, dan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pendapatan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pendapatan Daerah. Berdasarkan Kepmendagri tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Pengelolaan Perpajakan dan Pendapatan Daerah, yang telah ditetapkan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Keegiatannya, karena itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki Program dan Kegiatan berdasarkan usulan masyarakat Lampung Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra 2024-2026, berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana indikator kinerja tersebut tidak mengacu pada SPM Kementerian/Lembaga pusat. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perpajakan dan Pendapatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :
"Meningkatnya Kemandirian Daerah".

2. Sasaran

Selanjutnya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026 adalah :
"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan BAPENDA adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, daerah, Badan Pendapatan Daerah adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
- 2) Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :
 9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
 10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan penempatan Utang daerah sebagai Optimalisasi Kas.
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 11. Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - Analisa dan Pengembangan Pajak daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
 - Pendapatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 - Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah.
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
 - Penangihan Pajak Daerah.
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 serta perkiraan pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini :

TABEL 4.1.
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.	UNSUR PENUNJANG	5.677.916.146
5.02.	KEUANGAN	5.677.916.146
5.02.	Badan Pendaatan Daerah	5.677.916.146
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.982.184.146
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.390.100
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.777.500
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.823.800
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.363.000
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.224.400
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.261.400
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.820.000
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.120.000
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.263.067.846
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.327.846
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.450.000
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.815.000
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.475.000
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.402.000
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.402.000
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	29.485.000
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.485.000
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.370.000
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.120.000
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.250.000
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.238.400
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.575.000
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.030.000
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.860.000
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.059.000
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.713.800
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.100.000
5.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	0
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.100.000
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.976.300

5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.750.000
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.185.000
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.641.000
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.154.500
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.550.000
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.300.000
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.304.000
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	113.043.000
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	40.766.000
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40.766.000
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	44.858.000
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	44.858.000
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.582.689.000
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.582.689.000
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	215.177.000
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	126.728.000
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	57.585.000
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	457.555.000
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	486.205.000
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	346.370.600
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	162.373.400
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	102.280.000
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	282.887.000
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	42.375.000
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	252.992.000
JUMLAH		5.677.916.146

Selanjutnya, detail sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut :

TABEL 4.2.
DETAIL SUB KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulanan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 20 orang
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan
5.02.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparaturnya BPKD sebanyak 12 unit
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BPKD
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) sebanyak 2 rekening, air 1 rekening, dan listrik 4 rekening, selama 12 bulan
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari : - Pembayaran luran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran luran BPJS Aparat Pekon - Pembayaran luran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 11 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 8 unit
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 31 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 1 unit gedung di BAPENDA
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 36 unit, berupa standing banner untuk Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pemutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 11.000 Objek Pajak di Kecamatan Batu Brak
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMIOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek

	Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Penetapan Wajib Pajak Daerah sebanyak 2 Dokumen
Kode	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah

BAB V

PENUTUP

Demikianlah uraian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025, sebagai rencana tahunan dan bagian dari perencanaan strategi dan rencana umum jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024-2026.

Rancangan Awal Renja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini berisi program-program prioritas yang direncanakan dilaksanakan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Pada tahap pembahasan nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD) Kabupaten Lampung Barat yang akan mempertimbangkannya dengan melihat prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


Drs. DAMAN NASIR, M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002